

## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Isabella Catarina Ketaren

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Quality Medan  
Email : [catarinaisabella@gmail.com](mailto:catarinaisabella@gmail.com)

### ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2000 s.d. 2016 yang bersumber dari BPS dan BI. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara simultan pengeluaran pemerintah dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan; dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Ternyata variabel pengeluaran pemerintah dan pengangguran mampu menjelaskan model kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 78,4 persen. Variabel yang paling dominan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara adalah pengeluaran pemerintah.

**Kata kunci:** *kemiskinan, pengangguran, pengeluaran pemerintah*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pada awalnya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) diidentikan dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan, namun kenyataan tidak demikian. Hal ini terjadi karena angka-angka yang ditunjukkan oleh pendapatan nasional (*Gross National Product*) atau produk domestik bruto kurang peka dalam mengungkapkan masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Apalagi ditambah kenyataan bahwa jurang perbedaan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut (Arsyad, 2010).

Menurut Sharp *et al* (dalam Maipita, 2014) kemiskinan dapat disebabkan (a) rendahnya kualitas angkatan kerja, (b) akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal, (c) rendahnya tingkat penguasaan teknologi, (d) peng-

gunaan sumberdaya yang tidak efisien, dan (e) pertumbuhan penduduk yang tinggi.

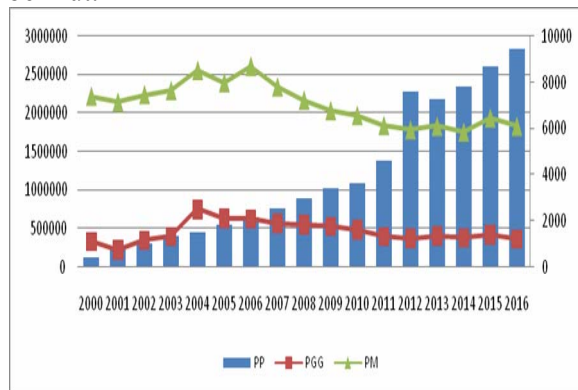
Menurut Sukirno (2004) menjelaskan pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah seluruh negara, baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Masalah pengangguran ini memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian Negara. Apabila ditelaah lebih lanjut, pengangguran merupakan suatu produk dari kegagalan pasar dalam memberikan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan angkatan kerja. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005). Tentunya jika penciptaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan ledakan penduduk, maka akan menghasilkan pengangguran yang semakin besar tiap tahunnya. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara tersebut.

Tidak hanya pengangguran yang berdampak pada peningkatan kemiskinan, tetapi juga pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Filmer & Pritchett (1997), Fan & Thorat (2000), Dollar & Kraay (2001), Bigsten & Levin (2001), Fan & Rao (2004), Laabas & Limam (2004), dan Klasen (2005) memperoleh hasil penelitian jenis pengeluaran pemerintah yang diidentifikasi mempunyai pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi, dan transfer.

Dari permasalahan ini diungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran dan pengeluaran pemerintah. Adapun perkembangan data pengangguran, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 s.d. 2016 di Sumatera Utara sebagai berikut:



**Gambar 1.** Perkembangan Penduduk Miskin, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2016

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran terjadi secara berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2006. Sedangkan jumlah pengangguran tertinggi pada tahun 2004. Tentunya naik

turunnya jumlah kemiskinan dan pengangguran ini mengindikasikan kondisi perekonomian pada tahun tersebut. Semakin sedikit kemiskinan dan pengangguran menunjukkan kondisi perekonomian semakin baik. Sedangkan jika dilihat tren pengeluaran pemerintah, maka dapat dilihat tren tersebut adalah positif naik dari tahun ke tahun. Seiring dengan naiknya grafik pengeluaran pemerintah, ada kecenderungan menurunnya grafik pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

Perubahan pengeluaran pemerintah dan pengangguran tentunya mampu mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara. Pengeluaran pemerintah yang tinggi diharapkan mampu membuka dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya menekan angka kemiskinan. Jika tingkat pengangguran di suatu negara yang relatif tinggi, cenderung akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin harus terus dapat ditekan agar pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata dan semakin meningkat setiap tahunnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan kepada masalah kemiskinan, pengangguran dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi pemerintah. Adapun data yang digunakan adalah data *time series* selama 26 tahun, mulai dari tahun 1991 – 2016, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia Sumatera Utara.

Untuk itu, fungsi-fungsi yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

$$JPM = f(PGG, PP) \dots\dots\dots(1)$$

Dari persamaan dispesifikasikan ke dalam model dan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma pada persamaan 2 sebagai berikut:

$$L(PM) = \beta_0 + \beta_1 L(PGG) - \beta_2 L(PP) + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

PM = Penduduk Miskin (Orang)

PGG = Pengangguran (Orang)

INV = Pengeluaran Pemerintah (Milyar)

L = Logaritma

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  ----  $\beta_2$  = Koefisien regresi

e = Variabel gangguan (*error term*)

Untuk memudahkan penafsiran dan memberikan batasan yang jelas mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini

maka disusun batasan operasional sebagai berikut :

1. Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu satu tahun (Jiwa).
2. Pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari kerja di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu satu tahun (Jiwa).
3. Pengeluaran pemerintah adalah realisasi total belanja daerah di Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara (Milyar).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan uji asumsi yakni uji normalitas, uji autokorelasi dan multikolinearitas. Seluruh pengolahan data penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS 24 dan Eviews 7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengkaji lebih dalam keterkaitan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan rincian deskriptif statistik variabel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.** Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	17	416.80	9476.42	3960.6988	3027.11309
PGG	17	229212.00	758092.00	463957.8824	133572.61740
PM	17	1360600.00	1979702.00	1649837.6470	216673.42080
Valid N (listwise)	17				

Sumber: Data penelitian, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2000 s.d. 2016 adalah sebesar 3.960,7 milyar/tahun jiwa, rata-rata jumlah pengangguran sebesar 463.957 orang, dan rata-rata penduduk miskin sebesar 1.649.837 orang.

Pada pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Dengan metode ini akan dianalisis besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, namun perlu juga memperhatikan pengujian persyaratan analisis data sebagai berikut:

### Pembahasan Hasil Uji Ekonometrika

Pembahasan uji ekonometrika dalam penelitian ini membahas 3 (tiga) bagian yakni

multikolinearitas, autokorelasi dan uji normalitas. Adapun pembahasan uji ekonometrika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Multikolinearitas

Sesuai dengan metode penelitian, multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *VIF* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, sebagai berikut:

**Tabel 2.** Variance Inflating Factor Model Penelitian

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
LPGG	.992	1.008
LPP	.992	1.008

Sumber: Data penelitian, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dengan kriteria bahwa jika nilai  $VIF < 10$  artinya di dalam model penelitian tidak terdapat multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi permasalahan multikolinearity dalam data penelitian ini.

#### b. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Durbin Watson diketahui nilai DW data penelitian ini sebesar 1,307 dan nilai berada pada tahap tidak dapat diputuskan dengan  $dL = 1,0154$  dan  $dU = 1,5361$ . Selanjutnya untuk memutuskan data penelitian terkena permasalahan autokorelasi atau tidak, maka dilakukan dengan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* menggunakan bantuan *software Eviews 7*. Adapun hasil uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan kriteria jika nilai prob.  $Obs*R-squared > 0.05$ , maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini. Berdasarkan uji tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.** Uji Autokorelasi : *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.632870	Prob. F(2,12)	0.5479
Obs*R-squared	1.622041	Prob. Chi-Square(2)	0.4444

Sumber: Data penelitian, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai prob.  $Obs*R-squared$  untuk model  $0,444 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini.

## b. Uji Normalitas

Pengujian terhadap uji normalitas dengan diperoleh hasil nilai Prob./Sig. > 0,05 artinya  $H_0$  ditolak berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau pengganggu/residual terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		17
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06103100
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.146
	Negative	-.138
Test Statistic		.146
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.  
Sumber: Data penelitian, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Sig. (0,200) > 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji normalitas dalam penelitian ini.

## Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Pengujian persyaratan analisis telah terpenuhi, selanjutnya pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

### a. Uji Keseluruhan Parameter (F-test)

Adapun hasil uji simultan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Uji Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.217	2	.108	25.436	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.060	14	.004		
	Total	.276	16			

- a. Dependent Variable: LPM  
b. Predictors: (Constant), LPP, LPGG  
Sumber: Data penelitian, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Sig 0,000 < 0,05, artinya bahwa secara simultan pengeluaran pemerintah dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

## b. Uji Parsial (t-test)

Adapun ringkasan perhitungan uji hipotesis sebagai berikut:

**Tabel 6. Uji Hipotesis**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.458	.732		19.753	.000		
LPP	-.128	.018	-.886	-7.111	.000	.992	1.008
LPGG	.067	.056	.149	1.192	.253	.992	1.008

- a. Dependent Variable: LPM  
Sumber: Data penelitian, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan perolehan nilai Sig. 0,000 < 0,05.
- Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

## c. Uji Koefisien Determinan/Kecocokan Model ( $R^2$ )

Adapun koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

Model	Model Summary <sup>b</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.886 <sup>a</sup>	.784	.753	.06524	1.307

- a. Predictors: (Constant), LPGG, LPP  
b. Dependent Variable: LPM  
Sumber: Data penelitian, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai  $R^2$  ( $R^2$  squared) sebesar 0,784. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan pengangguran mampu menjelaskan model kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 78,4 persen. Serta sisanya 21,6 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan Model Analisis

Pada model penelitian ini dihasilkan koefisien variabel dengan persamaan berikut :

$$LPM = 14,458 + 0,303 LPGG - 0,111 LPP + e$$

- Konstanta sebesar 14,458 menunjukkan bahwa jika variabel bebas seperti pengeluaran pemerintah dan pengangguran adalah konstan, maka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,458 persen/tahun.



- b. Setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan kemiskinan Prov. Sumatera Utara sebesar 0,128 atau 12,8 persen/tahun.
- c. Setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan Prov. Sumatera Utara sebesar 0,067 atau 6,7 persen/tahun.

#### **Pembahasan Variabel Penelitian**

##### **a. Variabel Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Prov. Sumatera Utara**

Variabel investasi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Amalia dkk (2015). Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yakni Filmer & Pritchett (1997), Fan & Thorat (2000), Dollar & Kraay (2001), Bigsten & Levin (2001), Fan & Rao (2004), Laabas & Limam (2004), dan Klasen (2005) memperoleh hasil penelitian jenis pengeluaran pemerintah yang diidentifikasi mempunyai pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kemiskinan.

Menurut penelitian di atas, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Jenis pengeluaran pemerintah yang dapat diidentifikasi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi dan transfer. Pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi terhadap kemiskinan secara tidak langsung adalah negatif dan signifikan. Jika dilihat dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh langsung pengeluaran pemerintah provinsi terhadap kemiskinan lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya. Pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan. Efek langsung muncul dalam bentuk manfaat yang diterima dari pengeluaran pada program kerja dan kesejahteraan. Efek tidak langsung muncul ketika investasi pemerintah di bidang infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian, kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan merangsang pertumbuhan pertanian dan non-pertanian yang mengarah kepekerjaan yang lebih besar dan kesempatan memperoleh penghasilan bagi masyarakat miskin dan bahan makanan yang lebih murah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka cenderung jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara akan semakin rendah.

##### **b. Variabel Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Prov. Sumatera Utara**

Variabel UMR memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya Suharianto dkk (2017) bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Namun berbeda dengan hasil penelitian Barika (2013) dan Jundi (2014), pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Tidak signifikkannya dampak pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara diduga dikarenakan oleh pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Artinya banyak sedikitnya pengangguran ini memiliki kompetensi dan sedang mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya. Permasalahan pengangguran adalah peluang atau kesempatan kerja yang mau tidak mau para pengangguran tersebut harus bisa bekerja secepatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran ini akan begitu berdampak pada kemiskinan jika tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja.

Seperti diketahui pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya. Kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Hal yang dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik dan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin serta mengakibatkan membengkaknya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah pengangguran,

maka cenderung jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara akan semakin banyak.

## KESIMPULAN

Secara simultan pengeluaran pemerintah dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Ternyata variabel pengeluaran pemerintah dan pengangguran mampu menjelaskan model kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 78,4 persen. Serta sisanya 21,6 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel yang paling dominan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara adalah pengangguran.

Dari hasil penelitian ini, untuk menekan angka kemiskinan hendaknya Pemerintah lebih memfokuskan pada upaya peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah adalah faktor dominan dalam menekan angka kemiskinan. Upaya peningkatan pengeluaran pemerintah tidak hanya diharapkan mampu menekan angka kemiskinan tetapi juga mampu menurunkan jumlah pengangguran yang ada di Sumatera Utara. Tidak hanya pengeluaran pemerintah yang perlu ditingkatkan tetapi sumber pembiayaan lain yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan yakni iklim investasi yang baik di Sumatera Utara. Investasi yang diharapkan adalah berbasis kegiatan produksi padat karya yang mampu menyerap dan membuka banyak lapangan tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rahmah, Madris, Rajak. Abdul Rahman. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Analisis, Desember 2015, Vol. 4 No. 2 : 183 – 189. ISSN 2303-100X.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barika. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Se Sumatera*. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan. Volume : 05. No. 01, Januari - Juni 2013. ISSN: 1979-7338.
- Bigsten, A. & Levin, J. (2001). Growth, Income Distribution and Poverty. *Working Paper in Economic*.
- Dollar, D. & Kraay, A. (2001). *Trade, Growth and Poverty*. Development Research Group, The World Bank.
- Fan, S. Zang. & Rao, N. (2004). *Public Investment, Growth and Rural Poverty*. Public Expenditures, Growth and Poverty: Lesson from Developing Countries. Hal. 56-108. International Food Policy Research Institute.
- Fan, S., Hazell, P. & Thorat, S. (2000). *Government Spending, Growth and Poverty in Rural India*. Amer. J. Agr. Econ. 82 (4) (November 2000): 1038-1051. American Agricultural Economics Association.
- Filmer, D. & Pritchett, L. (1997). *The Impact of Public Spending of Health : Does Money Matter?*. Social Science & Medicine. 49:1309- 1323.
- Jundi, Musa Al. (2014). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Klasen. (2005). *Economic Growth And Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues*. OECD Development Centre. Working Paper No.246.
- Laabas & Limam. (2004). *Impact of Public Policies on Poverty, Income Distribution and Growth*. Arab Planning Institute.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Nanga, Muana. 2005. *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (edisi ke-2). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sadono, Sukirno, 2004, *Pengantar Makroekonomi*, Edisi ketiga, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Suhariantono, Joko, dkk (2017). *The Influence Of Investment, Inflation, And Wages On Unemployment And Poverty In Province Of North Sumatera : A Concept Of Path Analysis*. Jurnal Proceeding Uniceb. ISSN 2599-1477